



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2024/Khusus - Awal Menjabat)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN AGAMA  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **JAMALI**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA**
3. NHK : **961230**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 2.550.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/84 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 340 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m2/100 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah Seluas 168 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
6. Tanah Seluas 268 m2 di KAB / KOTA BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
7. Tanah Seluas 2.539 m2 di KAB / KOTA BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
8. Tanah Seluas 383 m2 di KAB / KOTA BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
9. Tanah Seluas 1.625 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 87.000.000**



1. MOBIL, HONDA CR-V REI Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.  
80.000.000

2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.  
7.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. ----

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 126.800.000

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

**Sub Total**

Rp. 2.763.800.000

**III. HUTANG**

Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 2.763.800.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.